BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Setelah menjabarkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian, teori-teori yang telah mengukuhkan penelitian, maupun metode penelitian yang digunakan, maka bab ini akan dipaparkan mengenai hasil dari penelitian. Hasil penelitian akan dijabarkan berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi dan untuk yang berkaitan dengan variabel penelitian menggunakan kuesioner sebagai data primer.

4.1.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung merupakan unsur pelaksana Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung lainnya. Umumnya dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sejarah pajak mula-mula berasal dari negara Perancis pada zaman pemerintahan Napoleon Bonaparte, yang pada zamannya beliau terkenal dengan nama “Cope Napoleon”. Pada masa itu negara Belanda dijajah oleh negara Perancis. Sistem pajak yang diterapkan Perancis kepada Belanda diterapkan pula oleh Belanda kepada Indonesia pada saat Belanda menjajah Indonesia, yang pada saat itu dikenal dengan “*Oor Logs-Overgangs Blasting*” (Pajak Penghasilan).

Konsep pajak itu kemudian dibuat pada tahun 1942 di Australia disaat Indonesia masih diduduki tentara Jepang. Maksud dari peralihan mengenai pajak

ini merupakan suatu peraturan yang dibuat untuk mempersiapkan bilamana dikemudian hari penjajah Jepang ditarik kembali dari Indonesia.

Pemungutan pajak ini oleh pemerintah Belanda dilaksanakan oleh suatu badan yaitu "*Deinspetie van Vinancian*", yang kemudian diganti dengan nama "*Zeinenbu*" oleh pemerintah Jepang pada tanggal 15 maret 1942. Lima bulan kemudian, 15 Agustus 1942, nama tersebut diubah menjadi "Kantor Inspeksi Keuangan" dan berkantor di Gedung *Concordia* (sekarang Gedung Merdeka) Jalan Asia Afrika. Pada tanggal 21 Agustus 1947 bersamaan dengan Agresi Militer Belanda I, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Bandung Selatan di Kabupaten Soreang, bersama-sama dengan Tentara Keamanan Rakyat berevakuasi.

Setelah Agresi Militer Belanda II menyerang lagi pada tanggal 19 Desember 1948, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung dipindahkan ke Tasikmalaya. Bersamaan dengan kejadian tersebut, kekuasaan Republik Indonesia terpecah menjadi dua yaitu:

a. Kelompok *Coorporative,* yaitu kelompok anti republik yang tidak ikut evakuasi dan yang bekerja sama dengan NICA.
b. Kelompok *Non-Coorporative,* yaitu kelompok anti NICA bersama-sama Republik Indonesia bergerilya didaerah kantong-kantong yang tidak dikuasai oleh Belanda.

Setelah berakhirnya Agresi Militer Belanda II, Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang berada di Tasikmalaya dibubarkan dan kedudukannya dikembalikan ke Bandung pada tanggal 17 Desember 1947. Kantor Inspeksi

Keuangan Bandung pada saat itu diserahterimakan oleh menteri yang pertama, Bapak Safrudin Prawiranegara, dan kemudian menteri negara ini menunjuk Bapak Sahid Koesoemosarminto sebagai kepala Kantor Inspeksi Keuangan Bandung yang pertama, periode 1947-1950, berkantor di km "0" (*Groofpostweg*), saat ini di Jalan Asia Afrika Nomor 114 Bandung.

Sejak tahun 1968, Kantor Inspeksi Keuangan berganti nama menjadi Kantor Inspeksi Pajak Bandung. Pada tanggal 1 Agustus 1980, Kantor Inspeksi Pajak Bandung dibagi menjadi dua yakni Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat dan Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-48/KMK.01/1988 tanggal 19 Januari 1988 dibentuklah kantor baru yang diberi nama Kantor Inspeksi Bandung Tengah beralamat di Jalan Purnawarman No.21 Bandung dengan Drs. Untung Rivai sebagai kepala kantornya. Sejak berlakunya keputusan menteri keuangan tersebut maka di Bandung dibagi atas tiga kantor inpeksi pajak, yakni :

1. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Timur
2. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Tengah
3. Kantor Inspeksi Pajak Bandung Barat

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 23 Maret 1988 Nomor Kep-276/KMK/.01/1988, strukutr organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak di rombak dan berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah, maka dipandang perlu adanya Pembagian wilayah kerja agar dapat dimaksimalisasi

penerimaan dari sektor pajak. Perkembangan terakhir pada bulan April 2002, kantor pelayanan pajak di wilayah Bandung telah menjadi enam KPP yakni:

1) Kantor Pelayanan Pajak Bojonegara, Jalan Asia Afrika No.114
2) KPP Bandung Karees, Jalan Kiaracondong No.372
3) KPP Bandung Tegallega, Jalan Soekarno Hatta No.2116
4) KPP Bandung Cimahi, Jalan Raya Barat No.574
5) KPP Bandung Cibeunying, Jalan Purnawarman No.21
6) KPP Bandung Cicadas, Jalah Soekarno Hatta No. 78

Adapun Visi dan Misi dari Kantor Pelayanan (KPP) Wilayah Kota Bandung:

1. Visi

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

2. Misi

a. Politik, Mendukung Demokrasi Bangsa
b. Kelembagaan, Senantiasa memperbaharui diri, selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.
c. Fiskal, Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efesiensi yang tinggi.

d. Ekonomi, Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan yang *minimizing distortion*.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Wilayah Kota Bandung

Struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.64/KMK.01/1994 Tanggal 20 Maret 2009 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
2. Sub. Bagian Umum.
3. Seksi Pelayanan.
4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
5. Seksi Eksentifikasi Perpajakan
6. Seksi Penagihan.
7. Seksi Pemeriksaan.
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran tentang Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.

4.1.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang bertugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan dalam daerah wewenagnnya yang meliputi luas daerah tempat kedudukan Wajib Pajak dan Pajak pada daerah tertentu berdasarkan kebijaksanaan teknis yang

diterapkan oleh Direktorat Jendral Pajak. Deskripsi jabatan dari stuktur organisasi KPP Pratama Bandung adalah sebagai berikut:

1. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung.
    a. Mengawasi jalannya kegiatan operasional pelayanan perpajakan yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL) berdasarkan kebijakan teknis yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.
    b. Membina karyawan yang ada di wilayah wewenang kekuasaannya.
    c. Menerima laporan kerja dari setiap seksi.
    d. Membuat kegiatan operasional KPP wilayah Jawa Barat.
2. Sub Bagian Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan urusan kepegawaian,
    b. Melakukan urusan Keuangan,
    c. Melakukan urusan tata usaha,
    d. Melakukan urusan rumah tangga.
3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,
    b. Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak,
    c. Melakukan urusan penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya,
    d. Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan surat-surat ketetapan pajak.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
    a. Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman,
    b. Mempunyai tugas melakukan pengolahan data,
    c. Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.
5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan urusan penetapan,
    b. Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,
    c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak,
    b. Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan,
    c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin,
    b. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3,
    c. Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta
    d. Merekam Nota Hitung.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
    a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya,
    b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak,
    c. Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai
    d. Alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

4.1.3.1 Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung, memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.1.4 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebanyak 75 responden. Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut :

a. Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase
Pria	67	89,33%
Wanita	8	10,66%
Jumlah	75	100%

Berdasarkan Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa pegawai pajak yang bekerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung yang terpilih sebagai responden tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. Data yang diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden menunjukan bahwa responden yang berjenis kelamin pria sebesar 89,33%, dan responden yang berjenis kelamin wanita sebesar 10,66% jadi dapat disimpulkan mayoritas responden dalam penelitian ini adalah Pria.

b. Profil Responden Berdasarkan Usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Responden	Presentase %
20-25 Tahun	13	17,33%
26-30 Tahun	15	20%
31-35 Tahun	23	30,67%
36-40 Tahun	14	18,67%
> 40 Tahun	10	13,33%
Jumlah	75	100 %

Sumber: Data primer yang telah diolah,2011

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah (13) orang atau sebesar (17,33%), 26-30 tahun berjumlah (15) orang atau sebesar (20%,) 31-35 tahun berjumlah (23) orang atau sebesar (30,67%), 36-40 tahun sebesar (14) orang sebesar (18,67%), Diatas 40 tahun berjumlah (10) orang atau sebesar (13.33%). Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 31 - 35 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada pegawai pajak bagian pemeriksaan

untuk menilai kepatuhan wajib pajak lebih banyak berumur 31 - 35 tahun atau sebesar (30,67%).

c. Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase %
SMP atau sederajat	0	0%
SMA atau sederajat	0	0%
Diploma	19	25,33%
Strata 1 (S1)	41	54,67%
Strata 2 (S2)	15	20%
Jumlah	75	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah 2011

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa terdapat responden dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat sebanyak 0 orang atau sebesar 0%, Diploma III (D3) sebanyak 19 orang atau sebesar 25,33% dan responden dengan pendidikan terakhir Strata I (S1) sebanyak 41 orang atau sebesar 54,67%, pendidikan terakhir Strata II (S2) sebanyak 15 orang atau sebesar 20%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir Strata I (S1).

1. Profil Responden Berdasarkan Lama Kerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini:

Tabel 4.4
Profil Responden Pemeriksaan Pajak Berdasarkan Lama Kerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase %
s/d 1 Tahun	7	9,33%
1– 3 Tahun	17	22,67%
3 – 5 Tahun	24	32%
>5 Tahun	27	36%
Jumlah	75	100%

Sumber: Data primer yang telah diolah, 2011

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa responden yang bekerja dibawah 1 tahun sebanyak 7 orang atau sebesar 9,33%, responden dengan lama kerja 1–3 tahun sebanyak 17 orang atau sebesar 22,67% dan responden dengan lama kerja 3–5 tahun sebanyak 24 orang atau sebesar 32%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 27 orang atau sebesar 36%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak lebih dari 5 tahun.

4.2 Hasil Pembahasan

Pada bagian ini akan dijabarkan hasil penelitian tentang pengaruh Pemeriksaan Pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah kota Bandung. Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data hasil penelitian adalah analisis deskriptif dan pengujian hipotesis. Pada analisis deskriptif digunakan persentase jumlah skor jawaban untuk merepresentasikan tanggapan responden atas pernyataan-pernyataan yang diajukan dalam kuesioner.

Pada pengujian hipotesis digunakan analisis regressi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan, dan regressi yang digunakan adalah regressi linier sederhana. Karena hasil skoring jawaban responden pada variabel Pemeriksaan Pajak masih merupakan data ordinal maka agar data dapat diolah menggunakan analisis regressi terlebih dahulu dikonversi menjadi skala interval *method of succesive interval* (MSI).

4.2.1 Analisis Deskriptif Hasil Tanggapan Responden

Gambaran data hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana tanggapan responden terhadap setiap indikator dan variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden melalui persentase jumlah skor tanggapan responden.

4.2.1.1 Analisis Deskriptif Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

Pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Pemeriksaan pajak diukur menggunakan 14 (empatbelas) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 14 butir pertanyaan.

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 75 orang petugas seksi pemeriksaan pajak pada KPP di wilayah Kota Bandung. Analisis kualitatif (metode deskriptif) diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada

variabel pemeriksaan pajak. Untuk mendapatkan gambaran pemeriksaan pajak di wilayah Kota Bandung secara menyeluruh, dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas empat belas indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Rekapitulasi Skor Jawaban Responden Mengenai Pemeriksaan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	%	Kategori
1	Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data	364	5250	97,06	Sangat Baik
2	Menaganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak	359	5250	95,7	Sangat Baik
3	Mengidentifikasi masalah	345	375	92	Sangat Baik
4	Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak	349	375	93,06	Sangat Baik
5	Menentukan ruang lingkup pemeriksaan	343	375	91,46	Sangat Baik
6	Menyusun program pemeriksaan	359	375	95,73	Sangat Baik
7	Menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam	361	375	96,26	Sangat Baik
8	Menyediakan sarana pemeriksaan	344	375	91,73	Sangat Baik
9	Memeriksa di tempat Wajib Pajak	345	375	92	Sangat Baik
10	Melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern	364	375	97,06	Sangat Baik
11	Memutakhirkan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen,	353	375	94,13	Sangat Baik
12	Melakukan konfirmasi pada pihak ketiga	355	375	94,66	Sangat Baik
13	Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak	369	375	98,4	Sangat Baik
14	Melakukan sidang penutup (*Closing Conference*)	327	375	87,2	Sangat Baik
	Total	4925	5250	93,80	Sangat Baik

Perhitungan: Skor Ideal = Jumlah pertanyaan * Nilai tertinggi * Jumlah Responden

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di wilayah Bandung dapat dikatakan sudah sangat baik. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai pemeriksaan pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung berdasarkan tiap indikator di atas:

A. Tahapan Persiapan Pemeriksaan

1. Mempelajari berkas wajib pajak/berkas data

Indikator mempelajari berkas wajib pajak/berkas data diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Mempelajari Berkas Wajib Pajak/Berkas Data

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
1	Memeriksa berkas/data Wajib pajak yang akan diperiksa	F	64	11	0	0	0	364	375	97,06%
		%	85,33	14,67	0,0	0,0	0,0			

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.6 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{364}{1x5x75} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{364}{375} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 97,06\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 97,06%, bila merujuk pada tabel 4.10 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden

dalam hal memeriksa berkas/data wajib pajak yang diperiksa pada KPP Pratama Wilayah Kota Bandung pada umumnya data wajib pajak yang akan diperiksa di cross check data dengan data intern yaitu sebesar 85,33%. Sedangkan yang di check kebenaran data yang akan diperiksa yaitu sebesar 11,75%.

2. Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak

Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak merupakan indikator dari pemeriksaan pajak. Indikator menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menganalisis SPT dan Laporan Keuangan Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
2	SPT yang disampaikan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kenyataan pembukuannya	F	64	6	5	0	0	359	375	95,7%
		%	85,33	6,4	4	0,0	0,0			

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.7 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{359}{1x5x75} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{359}{375} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 95{,}07\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 95,07%, bila merujuk pada tabel 4.11 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini sesuai dengan hasil tanggapan responden sebesar 85,33% yang menanggapi bahwa SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak sudah sesuai dengan ketentuan dan pembukuannya, responden sebesar 6,4% juga berpendapat Wajib Pajak sudah hampir mendekati dengan ketentuan pengisian SPT dan 4% responden berpendapat hanya sebagian saja Wajib Pajak yang sesuai mengisi SPT dengan ketentuan perpajakannya.

3. Mengidentifikasi masalah

Indikator mengidentifikasi masalah diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Mengidentifikasi Masalah

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
3	Wajib pajak melunasi tunggakan pajaknya dan menyampaikan SPT	F	45	30	0	0	0	345	375	92%
		%	60	32	0,0	0,0	0,0			

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.8 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{345}{1x5x30} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{345}{375} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 92\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 92%, bila merujuk pada tabel 4.8 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai Wajib Pajak melunasi tunggakan pajaknya dan menyampaikan SPT yaitu sebesar 60% , kemudian 32% responden berpendapat Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT dan menyetorkan pajaknya.

4. Melakukan Pengenalan Lokasi Wajib Pajak

Indikator melakukan pengenalan lokasi wajib pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Pengenalan Lokasi Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
4	Meninjau usaha wajib pajak sebelum dilakukan pemeriksaan guna memastikan keberadaan usaha wajib pajak	F	49	26	0	0	0	349	375	93,06%
		%	65,33	28,33	0,00	0,0	0,0			

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.9 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{349}{1x5x75} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{349}{349} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 93,06\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 93,06%, bila merujuk pada tabel 4.9 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden sebesar 65,33% mengenai pentingnya melakukan pengenalan lokasi wajib pajak

menunjukkan bahwa dalam tahap persiapan sebelum dilakukan pemeriksaan harus terlebih dahulu harus melakukan pengenalan lokasi wajib pajak yang akan diperiksa agar hal tersebut dalam pelaksanaan pemeriksaan fokus dan untuk memastikan keberadaan usaha wajib pajak, jenis usaha, serta kelancaran usaha Wajib Pajak. 28,33% menyatakan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak mau memberikan alamat lokasi usahanya.

5. Menentukan Ruang Lingkup Pemeriksaan Data

Menentukan ruang lingkup pemeriksaan data merupakan indikator dari pemeriksaan pajak. Indikator menentukan ruang lingkup pemeriksaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menentukan Ruang Lingkup Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
5	Mempelajari cakupan pemeriksaan dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan	F	43	32	0	0	0	343	375	91,46%
		%	57,33	34,13	0,0	0,0	0,0			

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.10 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{343}{1x5x75} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{343}{375} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 91{,}46\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 91,46%, bila merujuk pada tabel 4.10 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai menentukan ruang lingkup pemeriksaan menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa penting dilakukan menentukan ruang lingkup pemeriksaan yaitu sebesar 57,33%, dan 34,13% responden berpendapat bahwa cukup diketahui dalam mempelajari cakupan dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan.

6. Menyusun Program Pemeriksaan

Indikator menyusun program pemeriksaaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menyusun Program Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
6	Melaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan	F	59	16	0	0	0	359	375	95,73%
		%	78,66	17,06	0,0	0,0	0,0			

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.11 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{359}{1x5x75} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{359}{375} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 95{,}73\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 95,73%, bila merujuk pada tabel 4.11 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa menyusun program pemeriksaan dilaksanakan apabila diperintah atasan sebesar 78,66% responden berpendapat bahwa menyusun program pemeriksaan dilaksanakan agar pemeriksaan terarah, dan 17,06% responden menanggapi menyusun program dilaksanakan hanya sekedar prosedur.

7. Menentukan Buku-Buku dan Dokumen yang akan dipinjam

Indikator menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menentukan Buku-Buku dan Dokumen Yang Akan Dipinjam

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
7	Sebelum melaksanakan pemeriksaan membuat daftar peminjaman buku dan dokumen yang akan dipinjam kepada wajib pajak	F	65	6	3	0	0	361	375	96,26%
		%	86,66	6,4	6,4	0,0	0,0			

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.12 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{361}{1x5x75} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{361}{375} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 96{,}26\%$$

Presentase total skor tanggapan responden sebesar 96,26%, bila merujuk pada tabel 4.12 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai menentukan buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam dilaksanakan agar pemeriksaan berjalan lancar yaitu sebesar 86,66%, kemudian 6,4% responden berpendapat dilaksanakan apabila diperintah atasan, 3,2% diketahui saja dalam menentukan peminjaman buku-buku dan dokumen yang akan dipinjam.

8. Menyediakan Sarana Pemeriksaan

Indikator menyediakan sarana pemeriksaan diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menyediakan Sarana Pemeriksaan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
8	Manfaat sarana pemeriksaan	F	58	9	3	0	0	344	375	91,73%
		%	77,33	9,6	4	0,0	0,0			

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.13 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{344}{1x5x75} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{344}{375} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 91{,}73\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar %, bila merujuk pada tabel 4.13 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai manfaat menyediakan sarana pemeriksaan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa dapat memperlancar, mempermudah dan mempercepat pemeriksaan yaitu sebesar 77,33%, kemudian 9,6% responden berpendapat dapat mempermudah pemeriksaan, 4% responden berpendapat bahwa manfaat sarana pemeriksaan dapat mempercepat pemeriksaan.

B. Tahapana Pelaksanaan Pemeriksaan

9. Memeriksa di tempat Wajib Pajak

Indikator memeriksa di tempat Wajib Pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Memeriksa di Tempat Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
9	Yang dilakukan pertama kali saat mendatangi wajib pajak yang akan diperiksa	F	50	20	5	0	0	345	375	92%
		%	66,66	21,33	4	0,0	0,0			

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.14 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{345}{1x5x75} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{345}{375} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 92\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 92%, bila merujuk pada tabel 4.14 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai memeriksa di tempat Wajib Pajak menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa dalam memeriksa di tempat wajib pajak hal yang pertama kali dilakukan memperlihatkan kartu tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan yaitu sebesar 66,66%, kemudian 21,33% responden berpendapat petugas akan memberikan surat perintah pemeriksaan, dan 4% responden berpendapat melakukan tanya jawab dengan Wajib Pajak.

10. Melakukan Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern

Indikator melakukan penilaian atas Sistem Pengendalian Intern diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
10	Perusahaan wajib pajak yang tidak memiliki Sistem Pengendalian Intern yang baik	F	64	11	0	0	0	364	375	97,06%
		%	85,33	11,73	0,0	0,0	0,0			

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.15 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{364}{1x5x75} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{364}{375} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 97{,}06\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 97,06%, bila merujuk pada tabel 4.15 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai melakukan penilaian atas sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa apabila perusahaan Wajib Pajak tidak memiliki sistem pengendalian intern informasi yang didapat tidak akurat, tidak dapat dipercaya dan tidak yaitu sebesar 85,33%, kemudian 11,73 responden berpendapat informasi tersebut tidak bias dipercaya begitu saja. Dalam melakukan penilaian atas system pengendalian intern dapat mengetahui kuat/lemahnya Sistem Pengendalian Intern, yang dapat bermanfaat sebagai bahan pemuktahiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.

11. Memuktakhirkan Pemeriksaan atas Buku-buku, Catatan-catatan, dan Dokumen-dokemen

Indikator memutakhirkan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.16
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Memutakhirkan Pemeriksaan Atas Buku-Buku, Catatan-Catatan, dan Dokumen-Dokumen

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
11	Meminjam buku, catatan dan dokumen kepada wajib pajak yang diperlukan untuk pelaksanaan pemeriksaan	F	53	22	0	0	0	353	375	94,13%
		%	70,66	23,46	0,0	0,0	0,0			

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.16 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{353}{1x5x75} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{353}{375} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 94{,}13\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 94,13%, bila merujuk pada tabel 4.16 termasuk dalam kategori sudah baik. Hasil tanggapan responden mengenai peminjaman dokumen kepada Wajib pajak tanggapan responden sebesar 23,66% menanggapi bahwa sulit dalam melakukan peminjaman dokumen kepada Wajib pajak. Dan responden yang bependapat tentang manfaat memuktahirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan berpendapat bahwa pemeriksaan akan lebih terarah kepada permasalahan sehingga mencapai hasil yang optimal yaitu sebesar 70,66%.

12. Melakukan Konfirmasi pada Pihak Ketiga

Indikator melakukan melakukan konfirmasi pada pihak ketiga diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.17
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Konfirmasi Pada Pihak Ketiga

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
12	Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga	F	55	20	0	0	0	355	375	94,66%
		%	73,33	21,33	0,0	0,0	0,0			

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.17 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{355}{1x5x75} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{355}{375} \text{ x } 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 94{,}66\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 94,66%, bila merujuk pada tabel 4.17 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa petugas mengalami kesulitan dalam melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga sebesar 73,33%, kemudian 21,33% responden berpendapat bahwa sangat sulit dalam melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Hal ini berkaitan dengan melakukan konfirmasi pihak ketiga dari tanggapan responden yang berpendapat bahwa setuju bukti-bukti dari pihak ketiga dapat diandalkan kepercayaannya. Dan manfaat konfirmasi kepada pihak

ketiga dari hasil tanggapan responden yang berpendapat bahwa dapat mengetahui kebenaran dan kelengkapan data dari wajib pajak .Berdasarkan hasil tanggapan responden tersebut maka kemungkinan masalah mengenai kendala dalam mengetahui data wajib pajak karena pihak ketiga tidak mudah member informasi kepada petugas pemeriksa pajak. Masalah yang selama ini terjadi terjawab dalam hasil tanggapan responden mengenai masalah pihak ketiga tidak mudah memberi informasi, yaitu masih ada responden yang menanggapi bahwa petugas mengalami kesulitan dalam melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga. Selain itu responden berpendapat bukti-bukti dari pihak ketiga dapat dipercaya keandalannya dan manfaat melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga dapat mengetahui kebenaran dan kelengkapan data dari Wajib Pajak.

13. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak

Indikator memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.18
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
13	Memberitahukan secara tertulis koreksi fiscal dan perhitungan pajak terutang kepada wajib pajak	F	69	6	0	0	0	369	375	98,4%
		%	92	6,4	0,0	0,0	0,0			

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.18 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{369}{1x5x75} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{369}{375} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 98,4\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 98,4%, bila merujuk pada tabel 4.18 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa selalu memberitahu wajib pajak yaitu sebesar 92%, kemudian 6,4% responden apabila diperintah atasan dan apabila ada waktu luang.

14. Melakukan Sidang Penutup *(Closing Conference)*

Indikator melakukan sidang penutup *(closing conference)* diukur menggunakan tanggapan responden pada pertanyaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.19
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melakukan Sidang Penutup

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
19	Melakukan pembahasan atas temuan koreksi fiscal serta perhitungan pajak terutang wajib pajak	F	50	15	3	4	0	327	375	87,2%
		%	66,66	16	2,4	2,13	0,0			

Berdasarkan jumlah skor jawaban responden pada tabel 4.19 diatas, selanjutnya ditetapkan tingkat kategori persentase skor tanggapan responden terhadap skor ideal dengan mengunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{327}{1x5x75} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = \frac{327}{375} \times 100\%$$

$$\% \text{ skor tanggapan responden} = 87{,}2\%$$

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 87,2%, bila merujuk pada tabel 4.19 termasuk dalam kategori sangat baik. 66,66 %nHasil tanggapan responden mengenai melakukan sidang penutup menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat bahwa dalam melakukan pembahasan atas temuan koreksi fiskal serta perhitungan pajak terutang wajib pajak terhadap seluruh jenis pajak yang akan diperiksa. Sedangkan 16%, 2,4% dan 2,135 apabila di perintah atasan saja.

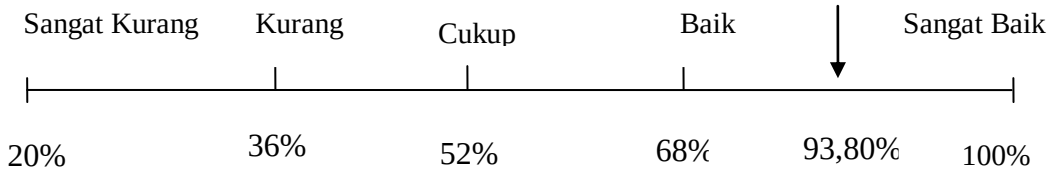
Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran variabel pemeriksaan pajak secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas kedelapan belas indikator yang membentuk variabel pemeriksaan pajak.

Tabel 4.20
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Pemeriksaan Pajak

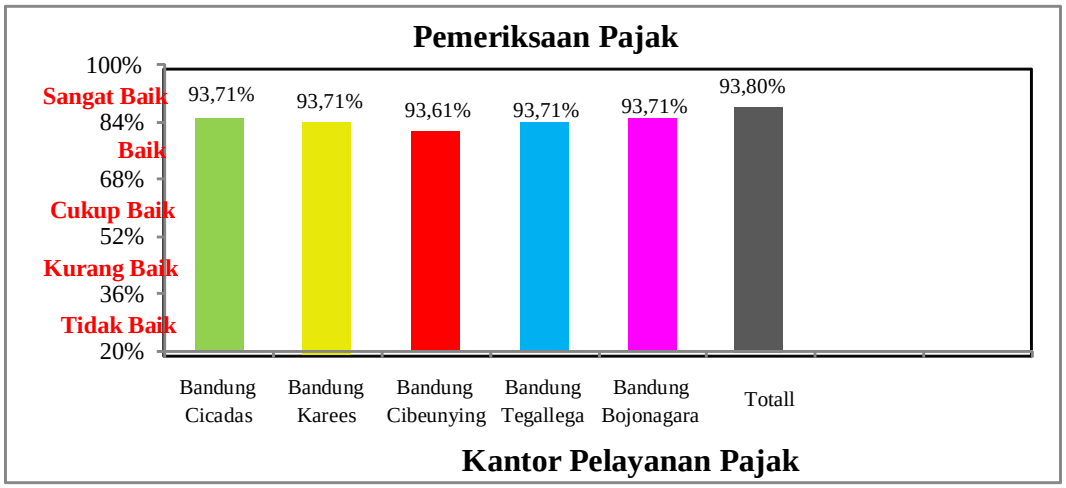
Variabel		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
		5	4	3	2	1			
Pemeriksaan Pajak	F	3940	920	51	8	6	4925	5250	93,80%
	%	75,05	17,52	0,97	0,15	0,11			

Melalui tabel 4.20 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 93,80% termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung, pada umumnya sudah dilaksanakan dengan baik. Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini dapat dilihat gambaran pemeriksaan pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

Gambar 4.1
Hasil Responden Perencanaan Pemeriksaan Pajak (Variable X_1)



Gambar 4.2
Hasil KategorisasiPemeriksaan Pajak Pada Masing-Masing KPP Pratama di Wilayah
Bandung



Bila dilihat berdasarkan kantor pelayanan pajak, pemeriksaan pajak pada KPP Bandung Cicadas merupakan yang paling baik, yaitu masuk kategori sangat baik, sebaliknya pemeriksaan pajak pada KPP Soreang merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori baik.

Memuat hasil pemeriksaan dalam bentuk, perbandingan antara pajak-pajak yang terhutang berdasarkan laporan wajib pajak dengan hasil pemeriksaan, data/informasi yang diproduksi, dan usul-usul pemeriksa. Responden (skor 93,80%) menanggapi bahwa laporan pemeriksaan pajak sudah disusun secara rinci, ringkas dan jelas, maka dapat disimpulkan bahwa laporan pemeriksaan sudah memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau

tidaknya penyimpangan terhadap peraturan perundang – undangan perpajakan dan memuat pula pengungkapan informasi tersebut yang terkait.

Berdasarkan hasil analisa di atas, penulis menyimpulkan bahwa tahapan pelaporan pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak di wilayah Kota Bandung dalam pembuatan laporan pemeriksaan sudah baik sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Laporan hasil akhir pemeriksaan berisi laporan mengenai proses pemeriksaan yang perlu dipertanggungjawabkan oleh pemeriksa pajak. Dan dari hasil penelitian menggambarkan bahwa laporan hasil pemeriksaan merupakan dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang sifatnya terikat hukum yang memiliki pengaruh terhadap Wajib Pajak maupun pemeriksa pajak. Selain itu laporan pemeriksaan pajak juga merupakan sarana bagi pihak – pihak lain untuk mengetahui berbagai hal tentang pemeriksaan baik berkenaan dengan pencarian informasi – informasi tertentu, maupun dalam rangka pengujian kepatuhan prosedur dan mutu pemeriksaan yang telah dilakukan. Oleh karena itulah laporan pemeriksaan pajak harus informative. Siti Kurnia Rahayu (210 : 323).

4.2.1.2 Analisis Deskriptif Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung

Pelaksanaa *Self Assessment System* pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan yang diajukan pada kuesioner. Pelaksanaan *Self Assessment System* diukur menggunakan 4 (lima) indikator dan

dioperasionalisasikan menjadi 4butir pernyataan. Berikut tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

Tabel 4.21
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Mendaftar

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
15	Wajib Pajak Mendaftar Sendiri	F	37	20	18	0	0	319	375	85,07%
		%	49,33	26,67	24	0,0	0,0			

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 85,07%, bila merujuk pada tabel 4.21 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai mendaftarkan diri di kantor pajak terdekat hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat wajib pajak yang sudaf mendaftar sebesar 49,33%, kemudian 26,67% responden belum mendaftrak diri di kantor pajak terdekat atau di daerah si wajib pajak berdomisili, sedangkan 15,12% responden berpendapat bahwa masih ada wajib pajak yang tidak sadar akan pajak.

Tabel 4.22
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menghitung

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
16	Wajib Pajak Menghitung Sendiri	F	16	10	39	0	0	237	375	63,2%
		%	21,33	10,66	31,2	0,0	0,0			

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 63,2%, bila merujuk pada tabel 4.22 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden mengenai menghitung sendiri pajaknya di kantor pajak terdekat hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat

wajib pajak masih ragu ragu dalam mengitung pajaknya sendiri sebesar 31,2%, kemudian 21,33% dan 10,66% responden yang bisa menyetor pajaknya.

Tabel 4.23
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Menyetor

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
17	Wajib Pajak Menyetor Sendiri	F	25	5	42	0	0	271	375	72,26%
		%	33,33	5,3	33,6	0,0	0,0			

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 72,26%, bila merujuk pada tabel 4.23 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai mendaftarkan diri di kantor pajak terdekat hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat wajib pajak yang sudaf menyetor sebesar 33,33% dan 5,3%, kemudian 33,6% responden berpendapat bahwa wajib pajak masih ragu ragu dalam menyetorkan pajaknya.

Tabel 4.24
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Melapor

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
18	Wajib Pajak Melapor Sendiri	F	37	14	24	0	0	313	375	83,46%
		%	49,33	14,93	19,2	0,0	0,0			

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 83,46%, bila merujuk pada tabel 4.24 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai mendaftarkan diri di kantor pajak terdekat hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat wajib pajak yang sudaf melapr pajaknya sebesar 49,33%, kemudian 14,93% , sedangkan

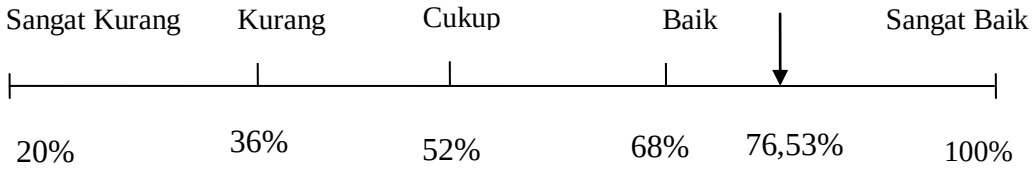
19,2% responden berpendapat bahwa masih ada wajib pajak yang belum menyerorkan pajaknya.

Tabel 4.25
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Pelaksanaa Self Assessment System

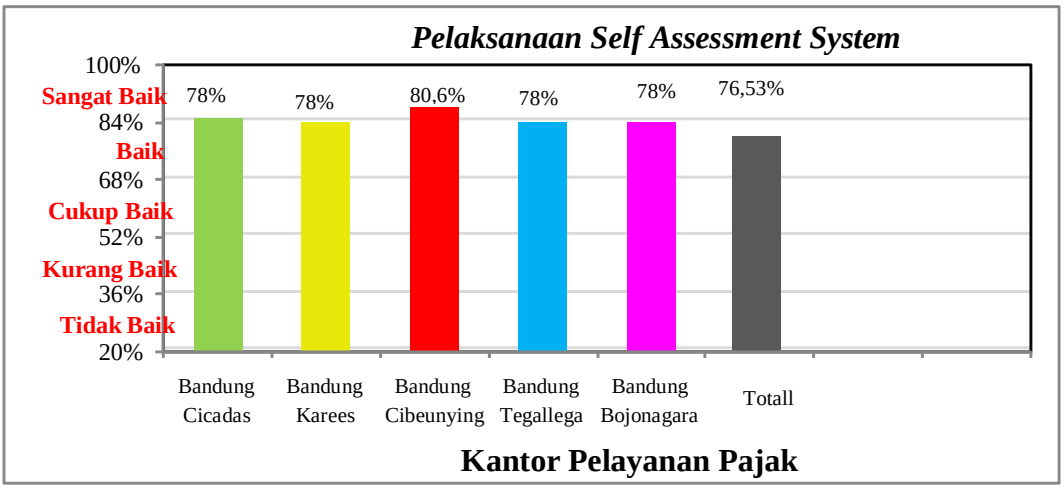
Variabel		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
		5	4	3	2	1			
Pelaksanaan Self Assessment System	F	115	49	123	0	0	287	375	76,53%
	%	30,66	17,07	32,8	0,0	0,0			

Melalui tabel 4.25 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 76,53% termasuk dalam kategori baik. Artinya pelaksanaan *Self Assessment System* pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung pada umumnya sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini dapat dilihat gambaran pelaksanaan *Self Assessment System* pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Kota Bandung.

Gambar 4.3
Hasil Responden Pelaksanaan Self Assessment system (Variable X_2)



Gambar 4.4
Hasil Kategorisasi Pelaksanaan Self Assessment system Pada Masing-Masing KPP Pratama di Wilayah Bandung



Dari uraian di atas, bahwa sebesar 76,53% pelaksanaan *Self Assessment System* sepenuhnya diserahkan dan dipercayakan kepada masyarakat, dalam hal ini wajib pajak untuk mengurus kewajiban perpajakannya mulai dari pendaftaran hingga pelaporan pajak terutangnya sudah berjalan dengan Baik.

Kesimpulannya adalah sistem perpajakan *Self Assessment System* memberi keprcayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya, mulai dari mendaftarkan diri di Kantor Pelayanan Pajak terdekat, menghitung dan atau memperhitungkan sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetor pajak tersebut ke Bank persepsi/kantor pos, melaporkan penyetoran tersebut kepada DJP, menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar. Tata cara

pemungutan pajak dengan *Self Assessment System* berhasil dengan baik jika masyarakat mempunyai pengetahuan dan disiplin pajak tinggi, di mana ciri *Self Assessment System* adalah adanya kepastian hukum, sederhana perhitungannya, mudah pelaksanaanya, lebih adil dan merata dan perhitungan pajak dilakukan oleh Wajib Pajak. Siti Kurnia Rahayu (2010 : 102).

1. 4.2.1.3 Analisis Deskriptif pemeriksaan pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama di Wilayah Kota Bandung.

Tabel 4.26
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
19	Wp sudah mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak	F	45	22	8	0	0	337	375	89,86%
		%	60	23,46	6,4	0,0	0,0			

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 89,86%, bila merujuk pada tabel 4.26 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai mendaftarkan diri di kantor pajak terdekat hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat wajib pajak yang sudaf mendaftar sebagai Wajib Pajak sebesar 60%% dan 23,46%, kemudian 6,4% responden berpendapat bahwa wajib pajak masih ragu ragu dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

Tabel 4.27
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan untuk menyetor kembali surat pemberitahuan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
20	Wajib pajak sudah benar menyetorkan kembali surat pemberitahuan	F	56	9	4	0	0	336	375	89,86%
		%	74,66	9,6	3,2	0,0	0,0			

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 89,86%, bila merujuk pada tabel 4.27 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai wajib pajak sudah menyetorkan kembali surat pemberitahuan di kantor pajak terdekat hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat wajib pajak yang sudaf menyerahkan kembali SPT sebesar 74,66%% dan 9,6%, kemudian 3,2% responden berpendapat bahwa wajib pajak masih ragu ragu dalam menyerahkan SPT.

Tabel 4.28
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
21	Perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	F	51	14	10	0	0	341	375	90,93%
		%	60	14,93	0	0,0	0,0			

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 90,93%, bila merujuk pada tabel 4.28 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai mendaftarkan diri di kantor pajak terdekat hasil pemeriksaan kepada

Wajib Pajak menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat wajib pajak penghitungan dan pembayaran pajak yang gterutansebesar 60 dan 14,93%.

Tabel 4.29
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan Dalam Pembayaran Tunggakan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
22	Wajib pajak sudah patuh dalam melaksanakan pembayaran tunggakan	F	47	13	15	0	0	332	375	88,53%
		%	62,66	13,86	12	0,0	0,0			

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 88,53%, bila merujuk pada tabel 4.29 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai wajib pajak di kantor pajak terdekat hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak Dalam Pembayaran Tunggakan menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat wajib pajak yang T Dalam Pembayaran Tunggakan sebesar 62,66%% dan 13,86%, kemudian 12% responden berpendapat bahwa wajib pajak masih ragu ragu Dalam Pembayaran Tunggakan.

Tabel 4.30
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan Dalam Menghitung Tunggakan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
23	Wajib pajak sudah patuh dalam menghitung tunggakan	F	43	5	27	0	0	316	375	84,26%
		%	57,33	5,33	21,6	0,0	0,0			

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 84,26%, bila merujuk pada tabel 4.30 termasuk dalam kategori sangat baik. Hasil tanggapan responden mengenai Dalam Menghitung Tunggakan wajib pajak di kantor pajak terdekat hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak Dalam menghitung Tunggakanmenunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat wajib pajak yang Dalam menghitung Tunggakan sebesar 57,33% dan 5,3%, kemudian 21,6% responden berpendapat bahwa wajib pajak masih ragu ragu Dalam menghitung Tunggakan

Tabel 4.31
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan Dalam Pembayaran Tunggakan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
24	Wajib pajak sudah benar dalam menghitung tunggakan	F	27	4	43	0	0	284	375	75,73%
		%	36	5,33	34,4	0,0	0,0			

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 75,73%, bila merujuk pada tabel 4.31 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden mengenai wajib pajak sudah menghitung tunggakan di kantor pajak terdekat hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat sebesar 36% dan 5,33%, kemudian 34,4% responden berpendapat bahwa wajib pajak masih ragu ragu dalam menghitung tunggakan.

Tabel 4.32
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Kepatuhan Dalam Pembayaran Tunggakan

No	Butir Pernyataan		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
			5	4	3	2	1			
25	Wajib pajak sudah jujur dalam menghitung pembayaran tunggakan	F	26	4	44	0	0	282	375	75,2%
		%	34,66	5,33	35,2	0,0	0,0			

Persentase total skor tanggapan responden sebesar 75,2%, bila merujuk pada tabel 4.32 termasuk dalam kategori baik. Hasil tanggapan responden mengenai wajib pajak yang njujur dalam menghitung pembayaran tunggakan di kantor pajak terdekat hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak menunjukkan bahwa paling banyak responden berpendapat sebesar 34,66% dan 5,33%, kemudian 35,2% responden berpendapat bahwa wajib pajak masih ragu ragu dalam menghitung tunggakan

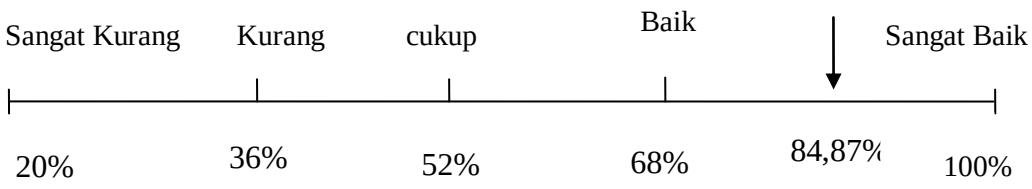
Setelah diuraikan hasil tanggapan responden pada masing-masing indikator, selanjutnya untuk mendapatkan gambaran variabel kepatuhan Wajib Pajak secara menyeluruh, dihitung akumulasi skor tanggapan responden dari seluruh indikator yang membentuknya. Berikut gambaran hasil akumulasi tanggapan responden atas ketujuh indikator yang membentuk variabel kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4.33
Akumulasi Tanggapan Responden Pada Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

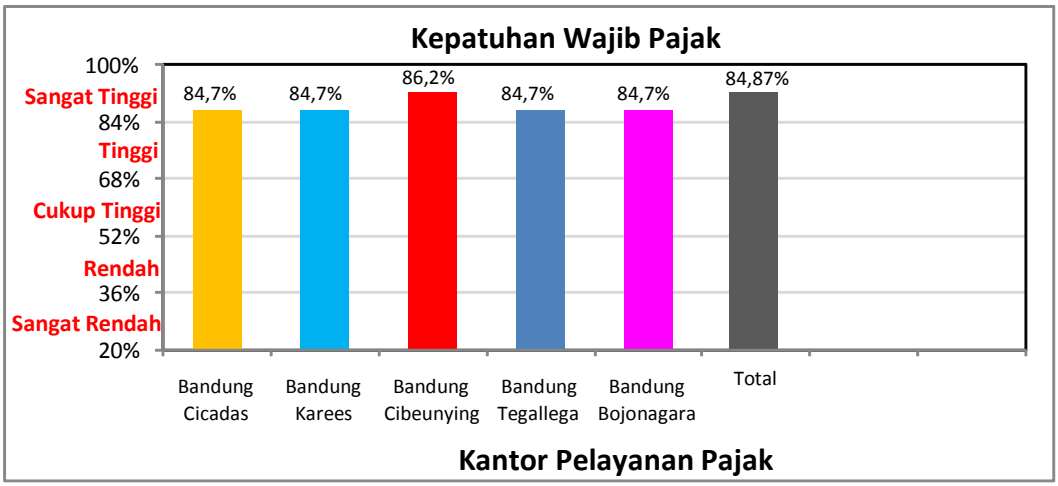
Variabel		Skor Tanggapan Responden					Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual
		5	4	3	2	1			
Kepatuhan Wajib Pajak	F	295	73	151	4	0	2228	2625	84,87%
	%	30,25	19,46	40,26	1.06	0,0			

Melalui tabel 4.33 dapat diketahui persentase skor akumulasi tanggapan responden sebesar 65,73% termasuk dalam kategori cukup tinggi. Artinya kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung pada umumnya sudah cukup tinggi. Untuk lebih jelasnya pada grafik berikut ini dapat dilihat gambaran kepatuhan wajib pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Bandung.

Gambar 4.5
Hasil Responden Pelaksanaan Self Assessment system (Variable X_2)



Gambar 4.6
Hasil Kategorisasi Kepatuhan Pajak Pada Masing-Masing KPP Pratama di Wilayah Bandung



Bila dilihat berdasarkan kantor pelayanan pajak, kepatuhan wajib pajak pada KPP Bandung Cicadas, Bandung Karees, Bandung Tegalega dan KPP Bojonegara merupakan yang paling tinggi, yaitu masuk kategori cukup tinggi, sebaliknya kepatuhan wajib pajak pada KPP Bandung Cibeunying merupakan yang paling rendah meskipun masih termasuk kategori cukup tinggi.

Kesimpulannya adalah kesadaran dan kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan tidak hanya tergantung pada masalah – masalah teknis saja yang menyangkut metode pemungutan, tarif pajak, teknis pemeriksaan, penyidikan, penerapan sanksi sebagai perwujudan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan, dan pelayanan kepada wajib pajak selaku pihak pemberi dana bagi negara dalam hal membayar pajak. Di samping itu juga tergantung pada kemauan wajib pajak juga, sampai sejauh mana wajib pajak tersebut akan mematuhi ketentuan perundang – undangan perpajakan.

Membayar pajak bukanlah merupakan tindasan yang semudah dan sesederhana membayar utnuk mendapatkan sesuatu (konsumsi) bagi masyarakat, tetapi di dalam pelaksanaannya penuh dengan hal yang bersifat emosional. Pada dasarnya tidak seorangpun yang menikmati kegiatan membayar pajak seperti menikmati kegiatan berbelanja.

Pada umumnya Wajib pajak cenderung meloloskan diri dari setiap pajak. Kecendrungan melakukan kecurangan oleh wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya lebih banyak terjadi dalam sistem pemungutan pajak *Self Assessment System.* Walapun tidak menutup kemungkinan dalam *System withholding Tax* juga cendrung wajib pajak melakukan kecurangan. Wajib pajak sebagai pemotong atau pemungut tidak menyetorkan dan tidak melaporkan apa yang telah merekan ambil dari pihak yang dipotong atau dipungut pajkanya. Siti Kurnia Rahayu (2010 : 142).

4.2.2 Ananlisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan *Self Assessment System* Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak

Setelah diuraikan gambaran data tanggapan responden, selanjutnya akan diuji pengaruh pemeriksaan pajak dan pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Tingkat kepatuhan pajak baik secara simultan maupun secara parsial. Pengujian akan dilakukan melalui tahapan sebagai berikut; Pengujian uji validitas, analisis regresi linier, koefisien korelasi parsial, koefisien determinasi serta pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan software SPSS.18, dan untuk lebih jelasnya akan dibahas berikut ini.

Analisis regresi linier merupakan analisis statistika yang bersifat parametrik dimana data yang digunakan harus memiliki skala pengukuran minimal interval. Karena data yang dihasilkan dari penyebaran kuesioner masih berskala ordinal, maka sebelumnya dilakukan konversi data skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan program MSI (*method of successive interval*).

Tabel 4.34
Rekap Data Variabel X_1,X_2 dan Variabel Y

Responden	X_1	X_2	**Y**	**$X\ 1^2$**	**$X2^2$**	X_1**Y**	X2**Y**	X2**Y**
1	70	16	27	490	256	1890	432	1120
2	69	20	35	4761	400	2415	700	1400
3	58	14	28	3364	196	1624	392	980
4	69	20	35	4761	400	2415	700	1400
5	58	16	28	3364	256	1624	448	1120
6	70	16	29	4900	256	2030	464	1120
7	68	19	34	4624	361	2312	646	1330
8	69	20	35	4761	400	2415	700	1400
9	65	12	31	4225	144	2015	372	840
10	57	11	21	3249	121	1197	231	770
11	69	19	35	4761	361	2415	665	1330
12	69	14	21	4761	196	1449	294	980
13	64	13	24	4096	169	1536	312	910
14	65	12	31	4225	144	2015	372	840
15	64	12	31	4096	144	1984	372	840
16	70	16	27	4900	256	1890	432	1120
17	69	20	35	4761	400	2415	700	1400
18	58	14	28	3364	196	1624	392	980
19	69	20	35	4761	400	2415	700	1400

20	58	16	28	3364	256	1624	448	1120
21	70	16	29	4900	256	2030	464	1120
22	68	19	34	4624	361	2312	646	1330
23	69	20	35	4761	400	2415	700	1400
24	65	12	31	4225	144	2015	372	840
25	57	11	21	3249	121	1197	231	770
26	69	19	35	4761	361	2415	665	1330
27	69	14	21	4761	196	1449	294	980
28	64	13	24	4096	169	1536	312	910
29	65	12	31	4225	144	2015	372	840
30	64	12	31	4096	144	1984	372	840
31	70	16	27	4900	256	1890	432	1120
32	69	20	35	4761	400	2415	700	1400
33	58	14	28	3364	196	1624	392	980
34	69	20	35	4761	400	2415	700	1400
35	58	16	28	3364	256	1624	448	1120
36	70	16	29	4900	256	2030	464	1120
37	68	19	34	4624	361	2312	646	1330
38	69	20	35	4761	400	2415	700	1400
39	65	12	31	4225	144	2015	372	840
40	57	11	21	3249	121	1197	231	770
41	58	16	29	5564	256	1682	464	1120
42	70	19	34	4900	361	2380	646	1330
43	68	20	35	4623	400	2380	700	1400
44	69	12	31	4761	144	2139	372	840
45	65	11	21	4225	121	1365	231	770
46	57	19	35	3249	361	1995	665	1330
47	69	14	21	4761	196	1449	294	980
48	69	13	24	4761	169	1656	312	910
49	64	12	31	4096	144	1984	372	840
50	65	12	31	4225	144	2015	372	840
51	64	16	27	4096	256	1728	432	1120
52	70	20	35	4900	400	2450	700	1400
53	69	14	28	4761	196	1932	392	980
54	58	20	35	3364	400	2030	700	1400
55	69	16	28	4761	256	1932	448	1120
56	58	16	29	3364	256	1682	464	1120
57	70	19	34	4900	369	2380	646	1330
58	68	20	35	4623	400	2380	700	1400
59	69	12	31	4761	144	2139	372	840

60	65	11	21	4225	121	1365	231	770
61	57	19	35	3249	369	1995	665	1330
62	69	14	21	4761	196	1449	294	980
63	69	13	24	4761	169	1656	312	910
64	64	12	31	4096	144	1984	372	840
65	65	12	31	4225	144	2015	372	840
66	64	16	27	4096	256	1728	432	1120
67	70	20	35	4900	400	2450	700	1400
68	69	14	28	4761	196	1932	392	980
69	58	20	35	3364	400	2030	700	1400
70	69	16	28	4761	256	1932	448	1120
71	58	16	29	3364	256	1682	464	1120
72	70	19	34	4900	369	2380	646	1330
73	68	20	35	4623	400	2380	700	1400
74	69	12	31	4761	144	2139	372	840
75	65	11	21	4225	121	1365	231	770
Jumlah	4919	1178	2233	321962	19312	146789	35898	82460

A. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 4.35
Hasil Analisis Regresi

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	55.006	4.587		11.993	.000
	Self Assessment System	.888	.189	.614	4.707	.000
	Kepatuhan	-.118	.126	-.123	-.941	.353

a. Dependent Variable: Pemeriksaan

Selanjutnya untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak (X) terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung digunakan analisis regresi linier Berganda. Dengan menggunakan data-data yang tercantum pada tabel 4.9, maka dapat diestimasi

persamaan regresi menggunakan rumus sebagai berikut: Model regresi yang digunakan adalah:

$$Y = a + bX$$

Angka konstan menunjukkan sebesar 55,006. Artinya besarnya pemeriksaan dilaksanaka jika wajib pajak tidak melaksanakan self assessment system dengan baik sebesar 55,006. Untuk menghitung besarnya peningkatan pelaksanaan pemeriksaan dan pelaksanaan Self Assessment system terhadap tingkat kepatuhan dapat dilihat pada angka *Unstandardized coefficient* untuk ketiga variabel tersebut, yaitu : 888 dan -118. Dengan demikian jumlah peningkatan sebesar 770.

Pada kasus ini maka didapat persamaan sebagai berikut :

$Y = a + b_1 + x_1 + b_2 x_2$

$= 55{,}006 + (888 \times 16) + (-118 \times 35)$

$= 55{,}006 + 14.208 – 41{,}30$

B. Koefisien Korelasi

Selanjutnya untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak (X) terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan (Y) pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kota Bandung digunakan analisis regresi linier sederhana. Dengan menggunakan data-data yang tercantum pada tabel 4.9.

Tabel 4.36
Hasil Analisis Regresi

Correlations

		Pemeriksaan	Self Assessment System
Pearson Correlation	Pemeriksaan	1.000	.261
	Self Assessment System	.261	1.000
Sig. (1-tailed)	Pemeriksaan	.	.012
	Self Assessment System	.012	.
N	Pemeriksaan	75	75
	Self Assessment System	75	75

Untuk penafsiran kuat lemahnya hubungan korelasi antar variabel digunakan kriteria sebagai berikut :

- Angka berkisar antara 0 s/d 1
- Besar kecilnya angka korelasi menetukan kuat atau lemahnya hubungan antara ketiga variabel. Patokan angkanya sebagai berikut :
  - 0 – 0,25 menyatakan Korealsu sangat lemah (dianggap tidak ada)
  - >0,25 – 0,5 menyatakan Korelasi Cukup
  - >0,5 – 0, 75 menyatakan Korelasi Kuat

- >0,75 – 1 menyatakan Korelasi Sangat Kuat.

- Korelasi dapat positif dan negatif, korelasi positif menunjukkan arah yang sama hubungan antar variabel, artinya jika variabel 1 besar, variable 2 semakin besar juga. Sebaliknya korelasi negatif menunjukkan arah yang berlawanan, artinya jika variabel 1 besar, maka variabel 2 menjadi kecil
- Jika korelasi dikemukakan sebesar 1, maka korelasi tersebut disebut korelasi sempurna. Artinya ketiga variabel mempunyai hubungan linear sempurna atau dengan kata lain variabel 1 mempengaruhi variabel 2 secara sempurna. Dalam kasus ini tidak diperlukan uji hipotetis untuk melihat tingkat signifikansi hubungan ketiga variabel tersebut lagi.
- Signifikansi hubungan tiga variabel dapat dianalisi dengan ketentuan sebagai berikut :
  - Jika probabilitas atau signifikasni <0,05 hubungan ketiga variabel signifikan
  - Jika frobabilitas atau signifikansi >0,05 hubungan ketiga variabel tidak signifikan
  - Dalam kasus tertentu angka signifikansi 0,05 diganti dengan 0,01 jika hasil perhitungan SPSS keluaran diberi tanda bintang (*).

Dari hasil perhitungan didapatkan angka korelasi antar frekuensi pemeriksaan dan Pelaksanaan *Self Assessnment System* sebesar 0,261. Artinya hubungan kedua variabel tersebut sangat kuat. Korelasi positif menunjukkan bahwa hubungan anatara pengaruh Pemeriksaan dan pelaksanaan *Self Assessment System* searah. Artinya jika Pemeriksaan dilaksanakan secara rutin maka tingkat

kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Sedangkan korelasi antara *Self Assessment System* dengan Kepatuhan wajib pajak sebesar 0, 12 , korelasi ini kuat dan searah didasarkan pada kriteria diatas.

Untuk melihat hubungan antara variabel pemeriksaan dan pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak 0,00 atau tidak dapat dilihat dari angka sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 dari tabel diatas. Ketentuan mengatakan jika angka probabilitas atau signifikasi <0,05 maka ada hubungan yang signifikan antara antara ketiga variabel tersebut. Jika angka probabilitas atau signifikansi >0,05 maka hubungan ketiga variabel tidak signifikan.

Kesimpulannya adalah hubungan antara variabel Pengaruh Pemeriksaan dan Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak sangat kuat, searah dan signifikan.

C. Analisis Koefisiensi Determinasi

Tabel 4.37
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.725[a]	.525	.512	3.300	.525	39.814	2	72	.000

a. Predictors: (Constant), Self Assessment System, Pemeriksaan

Untuk menghitung pengaruh Pemeriksaan dan Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap tingkat Kepatuhan Wajib Pajak menggunakan angka

R Square (angka korelasi yang di kuadradkan). Angka R square disebut juga koefisien Determinasi (KD). Besarnya angka Koefisien Determinasi dalam perhitungan di atas ialah sebesar 0, 525 atau sama dengan 52,5% (rumus untuk menghitung koefisien determinasi ialah r^2 x 100%). Angka tersebut mempunyai arti bahwa sebesar 52,2% variabel Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat diketahui melalui pemeriksaan dan pelaksanaan *Self Assessment System.* Dengan kata lain Pengaruh Pemeriksaan dan Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak adalah 52,5%. Sisanya 47,8% (100% - 52,5%), harus di jelaskan oleh faktor faktor penyebab lainnya, misalnya tehnology informasi, jumlah SDM, Kualiatas SDM, sarana dan prasarana pemeriksaan lainnya.

Dengan menggunakan angka – angka dari hasil analisis antara ketiga variabel yang disebut diatas, angka korelasi ialaha 0, 525 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,00. Artinya hubungan antara variabel pemeriksaan dan *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak kuat, signifikan, dan searah. Besarnya pengaruh pemeriksaan dan pelaksanaan self Assessment System terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dihitung dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

KD = r^2 x 100%

= 47,8%.

D. Uji Statistik

Uji Statistik yang digunakan adalah uji t dengan rumus sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r_s\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^{\,2}}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0{,}261\sqrt{15-2}}{\sqrt{1-(0{,}261)^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0{,}49}{0{,}93}$$

$$t_{hitung} = 0{,}526$$

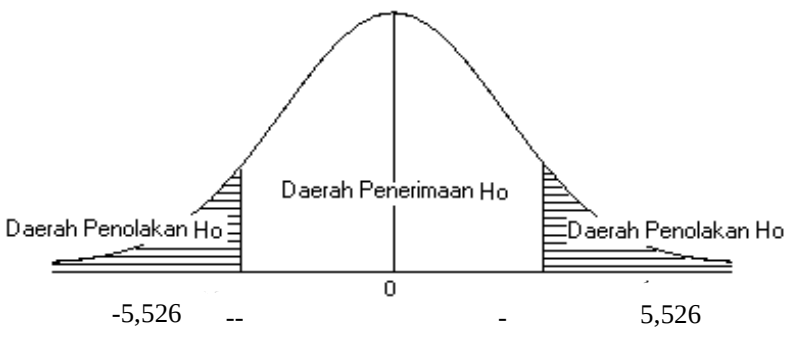
Dimana : Jika t_{hitung} > dari t_{tabel}, maka H_0 ditolak, H_1 diterima

Jika t_{hitung} < dari t_{tabel}, maka H_0 diterima, H_1 ditolak

Dengan taraf signifikan $\propto = 0{,}05$ (5%) dan dk= 15-2=13 maka, t_{tabel} = -

Jadi t_{hitung} 5,526 > t_{tabel} -, maka H_0 ada pada daerah penolakan berarti H_1 diterima atau Pemeriksaan Pajak dan pelaksanaan Self assessment system mempunyai peranan yang signifikan dan positif terhadap tingkat kepatuhan Pajak.

Gambar 4.7
Kurva t Distribusi (Uji Dua Pihak)



4.2.3 Kesimpulan Uji Hipotesis

Dari hasil pengolahan data baik pengujian hipotesis secara manual maupun dengan menggunakan *SPSS 18.0 for Windows* dapat dilihat bahwa didapat koefisien korelasi *rank spearman* sebesar r_{hitung} = 0,261 maka hubungan ini menurut aturan kriteria *Guilford* termasuk hubungan yang kuat. Karena t_{hitung} 5,526 > t_{tabel} -pada taraf kesalahan 5%, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima berarti Pemeriksaan Pajak dan pelaksanaan Self assessment System mempunyai peranan yang signifikan dan positif terhadap Tingkat kepatuhan pajak atau adanya korelasi searah antara variabel-variabel yang diuji, setiap kenaikan nilai X diikuti dengan nilai Y.

Ini menunjukan bahwa pengaruh Pemeriksaan Pajak dan pelaksanaan self assessment system yang baik akan dapat membantu pemeriksa pajak meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak akan semakin efektif dan akan lebih mengoptimalkan penerimaan pajak yang telah ditargetkan setiap tahunnya oleh pemerintah. Apabila Pemeriksaan Pajak dan pelaksanaan self

assessment system tidak memadai, maka tidak akan mampu membantu pemeriksa pajak dalam melaksanakan tingkat kepatuhan pajak, kepatuhan pajak akan semakin meningkat apabila diadakan pemeriksaan pajak dan pelaksanaan self assessment system dengan baik.